



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020**



Jl. Tripan dita 03, MAGETAN



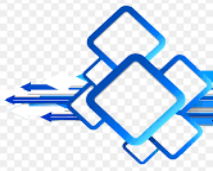
0351 894209



dpmdmagetan



dpmdmagetan



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3.1 Fungsi Umum	3
1.3.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3.3 Sumberdaya	9
1.3.4 Pembiayaan	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
Bab II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Indikator Kinerja Utama	19
2.3. Matrik Hubungan Misi . Tujuan, Sasaran dan IKU	23
2.4. Perjanjian Kinerja	24
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran	43
Bab IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak - pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

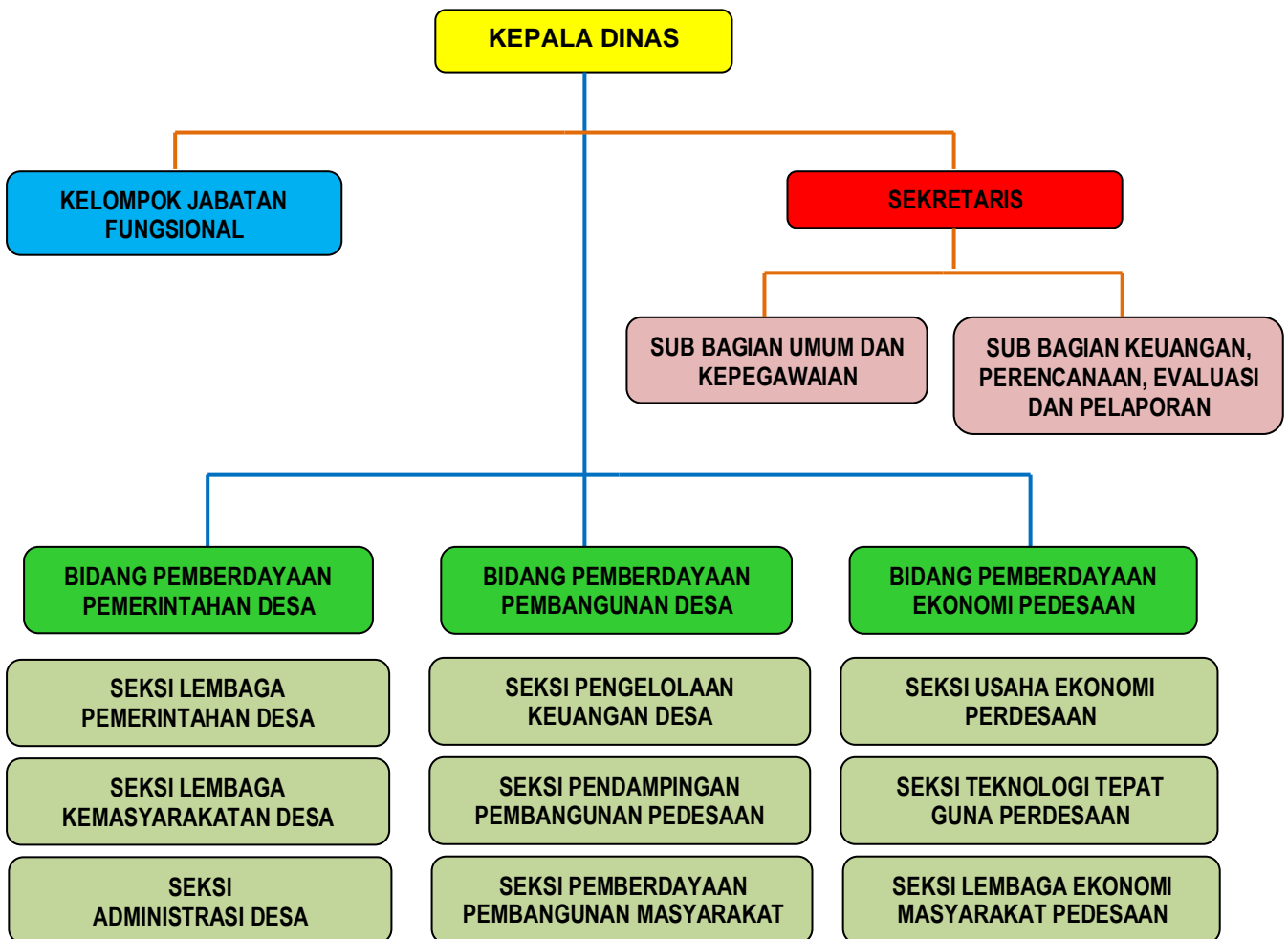
1.3.1. FUNGSI UMUM

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai :

- 1) penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :



1.3.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mempunyai Tugas Membantu Bupati Magetan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri atas Seksi Lembaga Pemerintahan Desa; Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan Seksi Administrasi Desa
 - b. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan yang terdiri atas seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan; Seksi Usaha Ekonomi Perdesaan; Seksi Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa yang terdiri atas seksi Pengelolaan Keuangan Desa; Seksi Pendampingan Pembangunan Perdesaan; dan Seksi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1
Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan

NO	JABATAN /BIDANG	JABATAN/SEKSI/ SUBAGIAN	FUNGSI
1.	Sekretariat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas 2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan 4. Pengelolaan urusan kepegawaian 5. Pengelolaan urusan keuangan 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai 8. Pengkoordinasian penyusunan orodgam dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang lain 9. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
2.		Sub bagian umum dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan 2. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa 3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan 4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor 5. Mengurus dan mencatat barang inventrais dan perlengkapan kantor 6. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai 7. Mengurus kesejahteraan pegawai 8. Merencanakan pengelolaan arsip 9. Melaksanaa tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
		Subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran 2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung

		pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan tata usaha keuangan 4. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 5. Melaksanakan urusan tata usahaperjalanan dinas 6. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai 7. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran 8. Menyusun laporan keuangan 9. Melaksanakan evakuasi dan monitoring anggaran 10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan 11. Menyiapkan dan penyusunan RENSTRA 12. Menganalisa dan menyusun rencana kerja (RENJA) 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kekuatan 14. Menginventarisir data hasil kegaitan untuk bahan menyusun laporan hasil kegatan 15. Menghimpun data dan menyusun SIPD,LKJip,LPPD, dan LKPJ 16. Mengelola dokumen perjanjian kinerja 17. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan SP, SOP dan SKM 18. Menyiapkan data untuk SIRUP 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
3.	Bidang Pemberdayaan pemerintahan desa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas 2. Penyusunan progdam dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pemerintahan desa 3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan administrasi desa 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

			<p>dibidang lembaga pemerintahan desa dan administrasi desa</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p>
4.	Bidang pemberdayaan ekonomi perdesaan		<p>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <p>2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan ekonomi perdesaan</p> <p>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan</p> <p>4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan Teknologi tepat guna perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p>
5.	Bidang pemberdayaan Pembangunan desa		<p>1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pembangunan desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas</p> <p>2. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang pemberdayaan pembangunan desa</p> <p>3. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>4. Pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan</p>

			<p>pembangunan perdesaan dan pemberdayaan pembangunan masyarakat perdesaan</p> <p>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pengelolaan keuangan desa, pendampingan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan</p> <p>6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas</p>
--	--	--	---

1.3.3. SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimiliki DPMD Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut ;

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	
2.	IV/d	-
3.	IV/c	1
4.	IV/b	1
5.	IV/a	2
6.	III/d	9
7.	III/c	6
8.	III/b	4

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
9.	III/a	5
10.	II/d	-
11.	II/c	2
12.	II/b	-
13.	II/a	-
Jumlah		30

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	2
5.	Kasi	IV.a	9
6.	Staf/Pelaksana	-	14
Jumlah			30

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2	5
2.	Strata 1 (S1)	18
3.	Sarjana Muda (D3)	2

4.	SLTA	5
5.	SLTP	
6.	SD	
Jumlah		30

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.5

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	4
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	7
Jumlah		11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.6

Daftar Saran Prasarana

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	unit	1
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	2
3.	Kendaraan roda 2	Unit	16
4.	Mesin Penghisap debu	Unit	1
5.	LCD proyektor	Unit	5
6.	Overhead proyektor	Unit	1
7.	Whiteboard	Unit	2

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
8.	Papan tulis	Unit	5
9.	Papan Nama Kantor	Unit	1
10.	Papan Pengumuman	Unit	1
11.	Papan Visuil	Unit	3
12.	Lemari Kaca	Unit	3
13.	Brankas	Unit	1
14.	Film	Unit	9
15.	Rak kayu	Unit	5
16.	Rak besi/metal	Unit	2
17.	Lemari besi/metal	Unit	1
18.	Mesin Hitung Manual	Unit	12
19.	Keyboard	Unit	2
20.	Meja Kayu pejabat eselon II	Unit	6
21.	Kursi pejabat eselon III	Unit	6
22.	Kursi kerja pejabat eselon II	Unit	2
23.	Meja rapat pejabat eselon III	Unit	4
24.	Meja kerja pegawai Non struktural	Unit	1
25.	Meja kerja pejabat eselon III	Unit	1
26.	Scanner	Unit	1
27.	Printer	Unit	24
28.	Finger Printer	Unit	1
29.	harddisk	Unit	26
30.	Notebook	Unit	27
31.	Laptop	Unit	17
32.	PC Unit	Unit	17
33.	Gordyn	Unit	2
34.	Handycam	Unit	1
35.	Tiang bendera	Unit	2

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
36.	Gambar Presiden/wakil	Unit	1
37.	Gambar garuda Pancasila	Unit	1
38.	Gerobag dorong	Unit	1
39.	Tape recorder	Unit	1
40.	Meja Kerja	Unit	27
41.	Kompore gas	Unit	2
42.	Faximile	Unit	4
43.	Pesawat telephone	Unit	3
44.	Sound system	Unit	1
45.	Camera	Unit	9
46.	Buffet Kaca	Unit	2
47.	Lemari arsip	Unit	6
48.	Kursi kerja pegawai	Unit	45
49.	radio	Unit	1
50.	Kipas angin	Unit	5
51.	Camera film	unit	5
52.	Wireless	Unit	1
53.	Tabung gas	Unit	1
54.	Stabilator	Unit	1

1.3.4. Pembiayaan

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas PMD Kabupaten Magetan didukung oleh Anggaran. Anggaran dioptimalisasikan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

Rincian APBD 2019 Yang Dikelola Dinas PMD

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	Belanja Daerah		
1.	Belanja Tidak Langsung		
	- Belanja pegawai	2.701.722.736	
2.	Belanja Langsung		
	- Belanja pegawai	776.460.000	
	- Belanja barang dan Jasa	2.960.685.000	
	- Belanja Modal	4.342.800.000	
	Jumlah	10.781.667.736	

1.4. SISTEMATIKA KEPENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran :

1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2018 – 2023
2. Rencana Kerja Tahun 2020
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 2020
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

WORK

the

**BAB II**
PERENCANAAN KINERJA**2.1. RENCANA STRATEGIS**

Dalam RPJMD tahun 2018 – 2023 Kabupaten Magetan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 berlandaskan visi sebagai berikut :

“ Masyarakat Magetan Yang SMART semakin Mantab dan Sejahtera ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) **Pertama**, Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumber daya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah, terampil);
- 2) **Kedua**, Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaigus ujung tombak pembangunan daerah;
- 3) **Ketiga**, Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 4) **Keempat**, memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;

- 5) **Kelima**, Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Visi-Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai Tugas dan Fungsi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (Dinas PMD) kabupaten Magetan, memiliki peran untuk menyukseskan strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sesuai matriks strategi dan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 - 2023 maka tugas Dinas PMD ada dalam wilayah strategi **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan desa serta lembaga perekonomian di desa. Dengan kegiatan yang mendukung kebijakan, memberikan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan aset dan keuangan desa serta meningkatkan kualitas lembaga perekonomian desa.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa juga memiliki tugas dalam mendukung kesuksesan Misi Kepala Daerah – Wakil Kepala yaitu :

- **Misi Kedua**, Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;

Dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mewujudkannya melalui Program yang mengarah pada kebijakan dalam hal :

- 1) Pengembangan kelembagaan desa
- 2) Pembangunan kawasan perdesaan
- 3) Pemberdayaan masyarakat perdesaan
- 4) Peningkatan dan pengembangan lembaga perekonomian desa

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya indeks status desa	Jumlah desa yang meningkat indeks statusnya	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan indeks status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan • Kabid. Pemberdayaan Pemerintahan Desa • Kabid. Pemberdayaan Pembangunan Desa 	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	<i>Skor dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>	Perhitungan berdasarkan skor dari analisa hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	$\frac{\sum \text{sarpras yang layak fungsi}}{\sum \text{sarpras yang tersedia}} \times 100$	
08	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan \& keuangan tepat waktu}}{\sum \text{dokumen perencanaan \& keuangan}} \times 100$	Pengukuran meliputi dokumen : Perencanaan Keuangan, Renja, Perubahan Renja, Renstra, Perubahan Renstra, Monev Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, LKjIP, LPPD, Laporan Keuangan Daerah, Laporan Akhir Kegiatan,
24	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga dan Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik.	$\sum \text{perangkat desa yang memahami tupoksi}$	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tupoksi diukur dari uji kompetensi • Perangkat desa yang paham tupoksi adalah perangkat desa yang mendapat nilai ≥ 75 dalam uji kompetensi
27	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa	$\sum \text{desa dengan LKD aktif}$	<ul style="list-style-type: none"> • LKD aktif diukur setiap tahun dengan menggunakan form penilaian Evaluasi Kinerja LKD dengan kategori : < 15 : kategori tidak aktif

	Desa	yang aktif		<p>15 – 30 : kategori kurang aktif 31 – 45 : kategori cukup aktif > 45 : kategori aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> LKD yang diukur kinerjanya adalah : LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu
16	Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	\sum lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga yang dijadikan objek pengukuran adalah BUMDes, Pasar desa, UPKU, UPK Lembaga ekonomi dinilai berkembang bila mengalami kenaikan omzet dari tahun sebelumnya
25	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna	\sum inovasi teknologi ekonomi	Pemberdayaan masyarakat desa dalam berinovasi memanfaatkan teknologi tepat guna
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase kegiatan atau pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat	$\frac{\sum \text{unsur masyarakat yang hadir musdes}}{\sum \text{unsur masyarakat dalam musdes}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> Unsur masyarakat dimaksud sesuai dengan Permendagri 114/2014 yang meliputi 8 unsur, yaitu : a) tokoh adat; b) tokoh agama; c) tokoh masyarakat; d) tokoh pendidikan; e) perwakilan kelompok tani; f) perwakilan kelompok perajin; g) perwakilan kelompok perempuan; h) perwakilan kelompok masyarakat miskin Perhitungan didasarkan pada jumlah keterwakilan unsur bukan jumlah yang hadir dari masing-masing unsure

				<ul style="list-style-type: none">• Apabila terdapat unsur masyarakat lain yang dihadirkan selain 8 unsur yang dimaksud, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan
26	Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	\sum desa dengan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan/peraturan pengelolaan keuangan yang digunakan adalah Permendagri 20/2018 serta Peraturan Bupati Magetan yang mengatur ketentuan pelaksanaannya• Perhitungan menggunakan Data Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

2.3. MATRIK HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN IKU

Tabel 2.2
Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU

Misi	Tujuan	Sasaran	IKU
Meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Meningkatkan derajat perekonomian masyarakat	Meningkatnya perekonomian rumah tangga miskin (RTM) di pedesaan	Jumlah Unit Pengelola Keuangan dan Usaha aktif
			Jumlah pelaku industry rumah tangga
			Jumlah desa yang memiliki BUMDES aktif
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerapkan teknologi tepat guna
Meningkatkan kapasitas sosial budaya, partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat	Meningkatkan partisipasi, keswadayaan dan kegotong-royongan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase Jumlah KPM aktif
			Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
			Jumlah lembaga pengelola Dana PNPM tanpa kolektibilitas
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat	Meningkatkan Keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa	Meningkatnya kinerja masyarakat dan pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan laporan keuangan sesuai dengan SAP
			Jumlah desa yang melakukan pengelolaan asset dengan baik
			Jumlah PKK aktif
			Prosentase SDM perangkat desa

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2020 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam tahun 2019 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkannya indeks status desa	Jumlah desa yang meningkat indeks status desa berdasarkan IDM	29 desa



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < x \leq 85$	Berhasil
$55 < x \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2020 diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri (desa)	3 desa	5 desa	166,6	
	Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju (desa)	26 desa	29 Desa	111.5	
	Jumlah BUMDesa aktif di desa	175 Bumdes	177 Bumdes	101	
	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	60 Kelompok	60 Kelompok	100	
	Jumlah Pasar Desa kondisi baik	34 Pasar	32 pasar	94	

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020 pada tabel diatas mengacu pada indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa

Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu “Meningkatnya Indeks Status Desa” yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni:

1. Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri
2. Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju
3. Jumlah desa yang meningkat indeks status desa

Tabel 3.2
Indikator Kinerja sasaran I tahun 2019

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Tahun 2019
1	Meningkatkan kemandirian desa			1.1	Jumlah desa maju yang menjadi desa mandiri	3 Desa
				1.2	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	26 Desa
		1.1	Meningkatnya indeks status desa	1.1.1	Jumlah desa yang meningkat indeks status desa	29 Desa

Adapun realisasi capaian dari tujuan dan sasaran kinerja 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2019			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Status Kemandirian	Jumlah Desa Maju yang menjadi Desa	3 desa	5 desa	166,6	

Desa	Mandiri (desa)				
	Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju (desa)	26 desa	29 Desa	111,5	
	Jumlah Desa yang meningkat indeks status Desanya	29 Desa	34 Desa	117	

Beberapa faktor pendukung tercapainya target kegiatan pada tahun 2019 antara lain:

1. Terfasilitasinya dengan baik pembentukan BUMDes.
2. Sosialisasi rutin terkait regulasi kepada masyarakat dan pemerintah desa.
3. Penyusunan regulasi (PERBUB) yang sesuai dengan PP dan UU.
4. Serta pembinaan terhadap lembaga dan pemerintah desa secara massif dan berkesinambungan.

Beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMD dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja atas tujuan dan sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. Tujuan dibidang Program Pemberdayaan Perekonomian Desa

Berikut ini akan diuraikan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019 untuk sasaran Meningkatnya Lembaga Perekonomian Desa di pedesaan :

Tabel 3.4

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR	REALISASI (2019)	TARGET (2020)	REALISASI (2020)
Jumlah desa yang memiliki BUMDES aktif		175	177
Jumlah Pasar Desa dengan kondisi baik		34	32

Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna	30	60	60
--	----	----	----

Upaya Meningkatkan Perekonomian rumah tangga miskin (RTM) dilaksanakan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan perekonomian masyarakat desa dan juga memfasilitasi pelaku usaha industri mikro perdesaan di Kabupaten Magetan. Hasilnya adalah:

- Jumlah Desa yang memiliki BUMDes tahun 2019 sebanyak 149 desa meningkat menjadi 177 desa. 177 BUMDes yang diaktivasi tahun 2020 melalui kegiatan pelatihan manajemen usaha, pendampingan program dan bantuan permodalan. Kesadaran desa untuk menguatkan posisi, fungsi BUMDes dalam upaya meningkatkan dinamika perekonomian desa. Pada tahun 2020 ini, pendampingan BUMDes diarahkan dalam kerangka kegiatan ekonomi produktif perdesaan.
- Jumlah pasar desa dengan kondisi baik pada target 2020 sebanyak 34 pasar desa. Dalam upaya mencapai target tersebut dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku pengelola pasar desa, baik dari segi administrasi pasar dan peningkatan SDM pengelola pasar desa sehingga realisasi yang dicapai pada tahun 2020 sebanyak 32 pasar desa dengan kondisi baik. Meskipun tidak tercapai 100% namun hal ini dapat dikatakan sangat berhasil mengingat minimnya dukungan anggaran pada kegiatan tersebut dimana dalam rangka mencapai target selain pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola pasar, mestinya juga diimbangi dengan refitalisasi pasar desa yang secara fisik perlu dilakukan perbaikan.
- Capaian Jumlah rumah tangga pemanfaat TTG tahun 2019 dan 2020 sama atau tidak mengalami peningkatan disebabkan oleh dukungan alokasi anggaran yang terbatas sehingga kegiatan pelatihan dan bantuan alat TTG tidak bisa ditingkatkan. Kedepannya Dinas PMD akan mendorong Desa untuk

mengalokasikan anggaran bantuan alat TTG atau pelatihan pemasyarakatan TTG dalam skema RAPBDes. Sehingga ada tanggung jawab desa dalam mengembangkan TTG.

1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Akhir renja

Pencapaian kinerja yang diukur terhadap realisasi kinerja sampai akhir periode renja 2020 akan dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan pendukungnya.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan s/d akhir periode renja

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)				
		5		7		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100				
		K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp			
-4	-5	Vol um e	Sat ua n	-17	-18	Vol um e	Sat ua n	-7	-8	Volu me	Satu an		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	60	%	2.525.000.000	40	%	181.500.000	39,87	%	180.900.000	99,67	99,67	
Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Desa) ;	207	Desa;	790.000.000	0	Desa;	0	0,00	Desa;	0	0	0	
	jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa (Desa)	432	Desa		18	Desa		0,00	Desa		-		
Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan	Jumlah pengisian anggota BPD (Desa) ;	207	Desa;	420.000.000	0	Desa;	6.500.000	0,00	Desa;	6.500.000	0	100,00	

Desa	jumlah BPD yang dibina (Desa)	828	Desa		207	Desa		207,00	Desa		100,00	
Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan (Orang)	11475	Orang	415.000.000	2295	Orang	60.000.000	2.252,00	Orang	59.400.000	98,13	99,00
Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa (Desa)	1035	Desa	900.000.000	207	Desa	115.000.000	207,00	Desa	115.000.000	100,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50,72	%	4.520.000.000	31,14	%	352.380.000	30,36	%	343.579.900	97,50	97,50
Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK (Kegiatan)	30	Kegiatan	4.000.000.000	6	Kegiatan	315.880.000	6,00	Kegiatan	307.079.900	100,00	97,21
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjandal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu (Orang)	1175	Orang	300.000.000	235	Orang	6.500.000	235,00	Orang	6.500.000	100,00	100,00
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan (Lembaga)	144	Lembaga	220.000.000	36	Lembaga	30.000.000	34,00	Lembaga	30.000.000	94,44	100,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	100	%	1.470.000.000	89,52	%	260.000.000	83,43	%	242.312.600	93,20	93,20
Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	Jumlah Bumdes yang dibentuk (Bumdes);	58	Bumdes;	400.000.000	28	Bumdes;	80.000.000	26,00	Bumdes;	73.838.100	92,86	92,30
	Jumlah Bumdes yang dikembangkan (Bumdes)	949	Bumdes		179	Bumdes		178,00	Bumdes		99,44	

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelompok ekonomi perdesaan (kelompok)	895	Kelompok	250.000.000	179	Kelompok	40.000.000	171,00	Kelompok	39.322.500	95,53	98,31
Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	Jumlah event pengembangan produk unggulan (kali)	10	Kali	395.000.000	2	Kali	42.500.000	2,00	Kali	40.146.300	100,00	94,46
Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah kegiatan pelestarian aset PNPM (Kegiatan)	15	Kegiatan	240.000.000	3	Kegiatan	47.500.000	3,00	Kegiatan	47.305.950	100,00	99,59
Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi desa berbasis kawasan (Kegiatan)	12	Kegiatan	100.000.000	3	Kegiatan	0	0,00	Kegiatan	-	-	0
Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan (pasar desa)	176	Pasar desa	70.000.000	34	Pasar desa	50.000.000	29,00	Pasar desa	41.699.750	85,29	83,40
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan pembinaan/monev (kelompok)	895	Kelompok	15.000.000	0	Kelompok	0	0,00	Kelompok	-	0	0
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna	100	%	370.000.000	84,21	%	45.000.000	82,73		44.211.000	98,25	98,25
Fasilitasi Pemasaran dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah kelompok yang memanfaatkan TTG dan jumlah kelompok yang mendapat pembinaan TTG (kelompok)	340	kelompok	350.000.000	64	kelompok	45.000.000	62,00	kelompok	44.211.000	96,88	98,25
Pengembangan Desa Mandiri Energi	Jumlah rumah tangga pemanfaat energi alternatif (Desa)	1	Desa	20.000.000	0	Desa	0	0,00	Desa	-	0	0

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kegiatan/pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	%	2.385.000.000	100	%	175.429.800	76,19		133.660.759	76,19	76,19
Pengembangan Forum Warga Desa Membangun	Jumlah kegiatan pembinaan forum warga (Kegiatan)	8	Kegiatan	300.000.000	0	Kegiatan	0	0,00	Kegiatan	-	0	0
Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi kegiatan sinergitas program pembangunan daerah dengan desa (Desa)	10	Desa	800.000.000	2	Desa	32.184.800	0,00	Desa	16.831.450	-	52,30
Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah kegiatan program akselerasi pembangunan pedesaan (Kegiatan)	15	Kegiatan	360.000.000	3	Kegiatan	90.000.000	3,00	Kegiatan	89.828.869	100,00	99,81
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (kali)	10	kali	625.000.000	2	kali	53.245.000	2,00	kali	27.000.440	100,00	50,71
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan musyawarah pembangunan desa (Kegiatan)	8	Kegiatan	300.000.000	2	Kegiatan	0	0,00	Kegiatan	-	-	0
Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	50,72	%	1.020.000.000	28,98	%	288.619.400	28,95		288.325.750	99,90	99,90
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa (Kegiatan)	25	Kegiatan	1.020.000.000	5	Kegiatan	288.619.400	5,00	Kegiatan	288.325.750	100,00	99,90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	82	Angka	1.616.000.000	77	Angka	288.000.000	77,46		281.710.371	97,82	97,82

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	60	bulan	1.136.000.000	12	bulan	238.000.000	12,00	bulan	232.203.421	100,00	97,56
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas (bulan)	60	bulan	480.000.000	12	bulan	50.000.000	12,00	bulan	49.506.950	100,00	99,01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	672.000.000	100	%	180.000.000	98,54		177.371.800	98,54	98,54
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)	1	jenis	12.000.000	0	jenis	100.000.000	0,00	jenis	99.374.300	0	99,37
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)	90	unit	300.000.000	18	unit	80.000.000	18,00	unit	77.997.500	100,00	97,50
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor (buah)	2	buah	10.000.000	0	buah	0	0,00	buah	-	0	0
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (jenis)	3	jenis	350.000.000	0	jenis	0	0,00	jenis	-	0	0
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	125.000.000	100	%	25.000.000	99,84		24.960.000	99,84	99,84
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun (dokumen)	52	dokumen	125.000.000	10	dokumen	25.000.000	10,00	dokumen	24.960.000	100,00	99,84
				14.703.000.000			1.795.929.200			1.717.032.180		

- Jumlah pameran produk UMKM pada tahun 2020 tidak dapat terealisasi dikarenakan kondisi pandemic covid-19 yang belum selesai.
- Jumlah Penerima Manfaat TTG yang diberikan pelatihan target Kinerja sampai akhir renja berjumlah 60 dan telah 100% terealisasi. Meskipun demikian keberhasilan capaian ini belum diikuti dengan pemanfaatan TTG.
- Jumlah pengelola pasar desa yang dilatih target kinerja sampai akhir renja 2020 adalah 37 pengelola pasar namun realisasinya hanya 32 Pasar desa atau 86,4 % yang tercapai. Ketidakberhasilan disebabkan oleh keterbatasan anggaran ditahun 2020 sehingga mengakibatkan pengurangan jumlah peserta.
- Jumlah Monev dan pelaporan Capaian kinerja UPKU target kinerja 179 kelompok dan terealisasi 171 kelompok atau 95,5 %.
- Jumlah sosialisasi Pilot Project BUMDes target kinerja sebanyak 5 kali dengan capaian realisasi 5 kali atau 100%. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmen Dinas PMD untuk menjadikan BUMDES sebagai pilar pokok lembaga ekonomi desa.

1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja dari Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan penunjang terwujudnya target. Program dan kegiatan tersebut tersaji sebagai berikut:

NO	Program	Kegiatan
1	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		Fasilitasi Pasar Desa
		Pembentukan dan Pengembangan BUMDES

		Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa
		Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan
4	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Fasilitasi Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Setelah melakukan pengukuran pencapaian kinerja dengan membandingkan capaian kinerja terhadap 3 (tiga) hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dianalisa bahwa upaya pencapaian sasaran Meningkatnya perekonomian di pedesaan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah pasar desa dengan kondisi baik

Pasar desa yang merupakan sarana prasana penunjang perekonomian masyarakat desa perlu terus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Pada tahun 2020 dari 37 jumlah pasar desa di Kabupaten Magetan, Dinas PMD menargetkan sebanyak 34 pasar desa dengan pengelolaan yang baik, dan tercapai sebanyak 32 pengelola pasar desa dengan kondisi baik atau 94,1 % dari target.

2. Jumlah desa yang memiliki BUMDES aktif

Target kinerja jumlah desa yang memiliki BUMDES aktif 175 dan tercapai sebanyak 177 BUMDes yang aktif. Hal ini dikarenakan mulai tumbuhnya kesadaran Pemerintra Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes sebagai pilar penunjang tercapainya perekonomian desa yang baik.

3. Prosentase Jumlah pelaku kelompok yang menggunakan TTG

Target jumlah pelaku kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna pada tahun 2020 sebanyak 60 kelompok. Dinas PMD melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tersebut sehingga pada tahun 2020

tercapai sebanyak 60 kelompok masyarakat yang memanfaatkan teknologi tepat guna. Kedepan Dds juga diharapkan membantu dalam pengembangan TTG melalui anggaran desa sehingga semakin tumbuh dan berkembang para pelaku kelompok usaha ekonomi masyarakat didesa yang menerapkan teknologi tepat guna.

4. Penguatan kelembagaan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Pedesaan. UPK merupakan unit pengelola keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam khusus perempuan didesa yang dilahirkan dari program PNPM, aset berupa dana simpan pinjam yang dikelola oleh saat ini dikabupaten magetan mencapai 15 milyar. Dengan besarnya jumlah aset yang ada diharapkan kedepan dapat mmpu mendorong perkembangan ekonomi masyarakat desa.

1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan ini, indikator kinerja sasaran 1 bisa digolongkan **telah** tercapai secara efisien. Kondisi ini dilihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020 sebesar **94,5%** lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar **92%**. sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		Jumlah	Dana	Jumlah	Dana	Jumlah	Dana
Jumlah penerima manfaat alat TTT yang dilatih	Kelompok	60	70.000.000	20	65.026.150	100	92,8
Jumlah pasar desa yang mendapat pembinaan	pasar	34	50.000.000	29	41.699.750	85,2	83,4
Jumlah kegiatan penguatan dan pelestarian aset PNPM	kegiatan	3	47.500.000	3	47.305.950	100	99,5
Jumlah BUMDes baru yang dibentuk	BUMDes	28	80.000.000	26	73.838.100	92,8	92,3
Rata-Rata Capaian Kinerja						94,5	92

Adapun upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan tenaga ahli dari pendamping program, kader-kader pemberdayaan desa dan pihak swasta (perbankan) melalui kerjasama kegiatan dalam pengembangan BUMDES.

1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebanyak 2 program dan 6 kegiatan dan dapat diuraikan dibawah ini:

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 260.000.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 242.312.600,- dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan 93,20%,

yang diarahkan untuk melaksanakan promosi hasil produk unggulan desa melalui penyelenggaraan pameran UMKM, Pembinaan dan Pembentukan BUMDes, Pembinaan Pasar Desa, penguatan kelembagaan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Pedesaan, serta monitoring dan evaluasi kelembagaan lembaga ekonomi Desa.

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Untuk mewujudkan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 44.211.000 atau 98,25%. Anggaran ini digunakan untuk melakukan pelatihan terhadap 60 kelompok masyarakat pemanfaat teknologi tepat guna.

2. Tujuan Meningkatkan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat

Tujuan Meningkatkan partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa” yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni:

- 1) Jumlah KPM Aktif
- 2) Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
- 3) Prosentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik

2.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan target dan realisasi kinerja untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa” yang dicapai melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan target & realisasi Sasaran 2 Tahun 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah KPM aktif	144	90	62,5 %	Cukup Berhasil

Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	100	80	80 %	Berhasil
Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	28	30	107	Sangat berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja			83,1	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa disimpulkan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut **berhasil**, dengan rata-rata capaian sebesar **83,1 %**.

2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2020

Berikut ini akan diuraikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019 untuk sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa :

Tabel 3.9
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR	REALISASI (2019)	TARGET (2020)	REALISASI (2020)
Jumlah KPM aktif	144	144	90
Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	100	100	100
Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	19,32	28,9	30

2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja dari Sasaran ini didukung dengan 9 (sembilan) kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan penunjang terwujudnya target. Kegiatan-kegiatan tersebut tersaji sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)
- 2) Akselerasi Pembangunan Pedesaan
- 3) Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa

4) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah melakukan pengukuran pencapaian kinerja dengan membandingkan capaian kinerja terhadap 3 (tiga) hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dianalisa bahwa upaya pencapaian sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa berdasarkan indikator sebagai berikut :

- Jumlah KPM aktif realisasi tahun 2019 adalah 90 orang, target 2020 adalah 144 orang namun capaian realisasi 2019 sebanyak 90 orang. Ketidakberhasilan memenuhi target kinerja 2020 adalah karena adanya perubahan strategi pencapaian target kinerja yaitu pembinaan terhadap KPM yang telah aktif untuk peningkatan kapasitas. Dengan demikian bila dilihat dari sisi kuantitas tidak tercapai target namun dari sisi kualitas terjadi peningkatan.
- Prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang tahun 2019 dan capaian target 2020 adalah sama 100. Membuktikan partisipasi masyarakat dalam musrenbang tetap terjaga dan kesadaran terlibat dalam perencanaan pembangunan meningkat
- Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik pada tahun 2019 dari target 28,9 % tercapai realisasi sebesar 30 % atau sebanyak 62 desa dari total 207 desa di Kabupaten Magetan. Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Pembinaan terhadap perangkat desa khususnya pengelola keuangan desa.
 - b. Sosialisasi secara intens terkait peraturan pengelolaan keuangan desa
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan (Manlak) pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa lebih mudah memahami peraturan-peraturan terkait desa

2.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi

anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan ini, indikator kinerja sasaran bisa digolongkan **telah** tercapai secara efisien. Kondisi ini dilihat dari capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020 capaian dana sebesar **95,61%**. sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Capaian Indikator Sasaran Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	
	Vol	Sat	Rp	Vol	Sat	Rp	Vol	Rp
1	6	7	8	9	10	11	12	14
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100	%	175.429.800	100	%	133.660.759	100,0	76,1
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	2	kali	53.245.000	1	kali	27.000.440	50	50,7
Akselerasi Pembangunan Pedesaan	3	kegiatan	90.000.000,00	3	kegiatan	89.828.869	100,0	99,8
Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	2	desa	32.184.800	1	desa	16.831.450	50	52,3

Program Fasilitas	19,32	%	288.619.400	25	%	288.325.750	129,4	99,9
Pengelolaan Keuangan Desa								
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	5	kegiatan	288.619.400	5	kegiatan	288.325.750	100,0	99,9
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN								

Pada tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya dampak pandemi covid-19. Adapun upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan tenaga ahli dari pendamping program, pendamping desa, kader-kader pemberdayaan desa dan pihak swasta berupa CSR dalam penyelenggaraan kegiatan sambang desa, pencaangan BBGRM.

3. Tujuan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Tujuan Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu “Meningkatnya kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa” yang diukur melalui 2 (dua) indikator yakni:

- 1) Persentase Lembaga dan Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik
- 2) Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif

Adapun uraian pencapaian target kinerja atas tujuan dan sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pencapaian kinerja yang diukur terhadap realisasi kinerja sampai akhir periode renja 2020 akan dilihat pada tabel berikut:.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)
		Vol	Sat	Vol	Sat	Vol
1	2	6	7	9	10	12
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	40	%	35	%	87,5
Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	jumlah pelaksanaan pemilihan kepala desa	0	desa	0	desa	0
	Jumlah pelaksanaan pengisian perangkat desa	18	desa	18	desa	100
Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	Jumlah pengisian anggota BPD; Jumlah BPD yang dibina	207	desa	207	desa	100,0
Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa	207	desa	207	desa	100,0
Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah perangkat desa yang mendapat pembinaan	2295	orang	2149	orang	93,6
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	31,14	%	30	%	96,4
Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah kegiatan peningkatan 10 program pokok PKK	6	kegiatan	6	kegiatan	100,0
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjandal Posyandu)	Jumlah peserta rakor kader Posyandu	235	orang	235	orang	100,0
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)						

3.2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan realisasi kinerja tahun 2020 untuk sasaran Meningkatnya kinerja lembaga dan pemerintahan desa :

Tabel 3.14
Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR	TARGET (2020)	REALISASI (2020)	Capaian
Persentase lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik	40		
Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	31,14		

Realisasi kinerja pada akhir renja tahun 2020 ada yang menunjukkan keberhasilan dan maupun kekurangan atau tidak berhasil mewujudkan target, dengan uraian sasaran capaian kegiatan sebagai berikut:

- Jumlah seluruh anggota lembaga pemerintah desa (BPD) sebanyak Dan jumlah seluruh perangkat Desa sebanyak..... Dari total seluruh lembaga dan pemerintahan desa yang melaksanakan tugas fungsi dengan baik sebanyak 18,84 %. Hal ini dihitung berdasarkan monitoring dan uji kompetensi perangkat desa yang dilakukan pada tahun 2019 terhadap seluruh perangkat desa dikabupaten magetan.
- Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari PKK, Posyandu, karang taruna, RT, RW dan LPM. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 24,15% dapat berfungsi secara aktif sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa tersebut. jumlah keseluruhan anggota lembaga kemasyarakatan desa dikabupaten Magetan

sebanyak..... realisasi dari target tersebut pada tahun 2019 sebesar 44,4% sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 183,9 % (sangat Berhasil).

- Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan aset dengan baik tahun 2018 adalah 36 desa, sementara target tahun 2019 adalah 207 desa namun realisasi hanya 97 desa. Terjadi perkembangan meskipun belum sesuai yang diharapkan. Analisa ketidakberhasilan indikator adalah disebabkan oleh lemahnya kapasitas perangkat desa dalam memahami pengelolaan aset.
- Jumlah TP PKK desa yang aktif sesuai target baik tahun 2018 dan 2019 sebanyak 207. Sebanyak 207 PKK aktif tersebut keseluruhan difasilitasi oleh pemerintah desa
- Prosentase SDM perangkat desa yang memenuhi persyaratan tahun 2019 realisasinya adalah 80% dari target 100%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh mekanisme pengisian perangkat desa belum memenuhi kuota dan standar kualitas SDM yang diinginkan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan juga disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam melaksanakan seluruh program/kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran tahun 2019

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317.000.000,00	313.203.822,00	98,80
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000,00	223.595.883,00	99,38
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	92.000.000,00	89.607.939,00	97,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.350.000,00	78.224.903,00	99,84
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.350.000,00	66.224.903,00	99,81
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.945.400,00	99,73
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	19.945.400,00	99,73

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	173.000.000,00	160.639.450,00	92,86
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000,00	10.950.000,00	73,00
Fasilitasi Pasar Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	43.000.000,00	41.958.800,00	97,58
	0,00	0,00	
Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	75.000.000,00	73.442.000,00	97,92
Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan	30.000.000,00	24.288.650,00	80,96
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	426.100.000,00	395.182.000,00	92,74
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	125.000.000,00	123.300.000,00	98,64
Akselerasi Pembangunan Pedesaan	80.000.000,00	77.282.000,00	96,60
Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	185.000.000,00	158.500.000,00	85,68
Jalin Matra	36.100.000,00	36.100.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	5.802.495.000,00	5.593.777.200,00	96,40
Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	5.367.495.000,00	5.206.459.200,00	97,00
	0,00	0,00	
Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	200.000.000,00	180.765.500,00	90,38
Fasilitasi Perlombaan Desa/ Kelurahan	137.000.000,00	117.852.500,00	86,02
Pembinaan Aparatur Desa	98.000.000,00	88.700.000,00	90,51
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	70.000.000	65.026.150	92,89
Fasilitasi Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	70.000.000,00	65.026.150,00	92,89

Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	328.000.000,00	324.643.700,00	98,98
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	328.000.000,00	324.643.700,00	98,98
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	865.000.000,00	826.351.400,00	95,53
Peningkatan 10 Program Pokok PKK	825.000.000,00	797.585.100,00	96,68
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)	40.000.000,00	28.766.300,00	71,92
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)			96,42



BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

4.1 KESIMPULAN

Secara umum dari keseluruhan sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Magetan tahun 2020 Rata-Rata Capaian kinerja yang diraih dari seluruh indikator capaian program dan kegiatan adalah% masuk kategori **Sangat Berhasil**, namun demikian ada beberapa yang belum bisa mencapai target secara maksimal diantaranya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa, dari target yang ditetapkan sebesar 30 % hanya terealisasi sebesar 18,84%, hal ini disebabkan kurangnya pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa dikarenakan minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan aparatur serta adanya beberapa perangkat desa dan kepala desa baru yang belum mendapat pembinaan. Selain itu banyaknya regulasi atau peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang sering berubah-ubah dan terkadang tidak sinkron antara peraturan yang satu dengan yang lain. Hal dikarenakan memang lembaga kementerian yang membawahi atau mengatur tentang desa ada 3 yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Kedepan tentunya ini akan disikapi dengan melakukan pembinaan dan pelatihan seriat

pembekalan terhadap kepala desa dan perangkat desa baru agar mampu mencapai target yang sudah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan tahun 2020 yang menggambarkan capaian kinerja terhadap indikator kinerja organisasi.

Magetan, Maret 2020


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Magetan
ERO MURYANTO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750527 199311 1 001